

Analisis Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Rasyid Zamzami Hasibuan

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

rasyidzamzamihsb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi sosial ekonomi setelah adanya kebijakan desentralisasi fiskal di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini melakukan analisis deskriptif untuk melihat kondisi sosial ekonomi, data yang digunakan untuk kondisi ekonomi itu adalah data PDRB, Pertumbuhan ekonomi, Struktur ekonomi, sedangkan untuk kondisi sosialnya data yang digunakan adalah data kemiskinan, IPM, dan pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan indikator sosial di Kabupaten Mandailing Natal setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat dilihat dari kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang setiap tahunnya terus meningkat dan jumlah kemiskinan terus menurun dan indikator ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan dan perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Mandailing Natal di era kepemimpinan Dahlan-Sukhairi ditahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari kenaikan jumlah APBD berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB.

Kata Kunci: Kebijakan Desentralisasi Fiskal, PDRB, Kemiskinan, IPM, APBD, Kesehatan, Pendidikan, Pengangguran

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alenia IV pembukaan UUD 1945, pembangunan sebagai salah satu cermin pengalaman pancasila terutama dijiwai sila kelima, keadilan social seluruh rakyat Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam GBHN 1998 (poin F:penjelasan ke-10) disebut bahwa arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi secara optimal dalam terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karna itu penting dan sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga keadilan dan pemerataan hasil hasil pembangunan merata di seluruh tanah air. Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun makin mendekatkan pada tujuan nasional.

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim, dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis setelah jatuhnya pemerintahan soeharto, serta sebagai reaksi yang kuat dari kecendrungan sentralisasi kekuasaan dan sumber daya di pemerintah pusat selama tiga dekade terakhir. Masalahnya, pemerintah demokratis yang datang setelah pergantian rezim tidak memiliki kekuatan " pemersatu nasional" seperti yang dimiliki rezim sebelumnya, dan juga tidak memiliki daya setrivalg politis. Banyak provinsi yang kaya dengan sumber daya alam menyatakan ketidakpuasan atas hasil eksploitasi sumber daya alamnya yang sebagian besar digunakan oleh pemerintah pusat. Struktur pemerintah terpusat telah mengakibatkan kesenjangan regional antara jakarta dan jawa dengan luar jawa, maupun antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia (Kuncoro, 2002).

Dalam konstelasi semacam ini dapat mudah menyulut ketidakpuasan daerah. Gerakan separatist mulai muncul di provinsi Timor Timur, Aceh, Papua dan skala yang lebih kecil terjadi di Riau, yang mengakibatkan terancamnya integritas nasional Indonesia. Dengan mengecualikan Timor-Timur, protes berbasis kedaerahan yang terjadi pada penghujung 1998 secara tegas mengindikasikan ketidakpuasan terhadap kebijakan desentralisasi pemerintahan dan keuangan sebagai pemicu utamanya (Pratikno,1999). Tuntutan terhadap otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi maupun merdeka, terutama datang dari daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya alam yang kuat, seperti Aceh, Irian Jaya dan Riau, yang memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan nasional, namun tidak memberikan alokasi keuntungan yang berarti. Presiden Habibie, yang memerintah setelah jatuhnya rezim soeharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional, dan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan pembagian kekuasaan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat serta memberikan otonomi kepada daerah.

Pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu UU No. 22/1999 mengenai pemerintahan daerah, dan UU no. 25/1999 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU No. 22/1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada daerah. Keadaan tersebut, terutama motivasi politik, tidak diragukan lagi mempengaruhi banyak aspek dalam desain akhir desentralisasi seperti dituangkan dalam undang-undang yang berkaitan dengan otda. Setelah menerapkan sistem yang amat sentralistik, kedua UU di atas menegaskan adanya fungsi dan kewenangan pemerintah daerah yang lebih besar dibanding UU No.5/1975. Oleh karena itu, beberapa pengamat menyebut diterapkannya pendekatan *big bang*, radikal, dalam struktur pemerintah dan desentralisasi fiskal karena mengubah drastis pola hubungan hubungan pusat dan daerah.

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Menurut Todaro (2015). Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur social, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara maupun daerah. Ukuran keberhasilan suatu negara maupun daerah dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditandai dengan kenaikan pendapatan daerah yang dihasilkan dari meningkatnya hasil produksi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang melambat ditandai dengan menurunnya hasil produksi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan berbagai upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal. Hal ini tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai peranan sebagai faktor produksi.

Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,3%, adalah salah satu negara yang sedang berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada

akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pendapatan nasional yang ditunjukkan dengan besarnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan dampak dari terjadinya pandemi perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, dimana sebagian besar sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif dan hanya beberapa dari sektor lapangan usaha tersebut yang memiliki pertumbuhan yang positif.

Perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan, sebagian besar sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,93 persen, sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor mengalami kontraksi sebesar -3,72 persen, sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar -3,26 persen, sektor pertambangan dan pengalihan mengalami kontraksi sebesar -1,95 persen, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup besar yaitu -15,04 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minimum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen. Penurunan dan kenaikan pertumbuhan ekonomi ini terjadi dikarenakan selama masa krisis virus covid-19 diberlakukan nya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di seluruh Indonesia, dan hal ini mengharuskan seluruh masyarakat melakukan seluruh aktifitas dilakukan dirumah secara online atau daring atau yang biasa disebut dengan Work From Home (WFH).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2016 sebesar Rp 628.394,16 milyar yang tergolong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai (21,65%). Selanjutnya sektor industri pengolahan (19,98%), sektor perdagangan (17,89%), sektor konstruksi (13,40%) dan sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 27,08% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (BPS Sumatera Utara).

Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Kabupaten Mandailing Natal terhadap Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja perekonomian sebuah Negara, pertumbuhan ekonomi yang biasanya diukur dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan sejauh mana kinerja sektor-sektor perekonomian dalam menghasilkan output. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila PDB yang dihasilkan meningkat dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Berikut dapat kita lihat kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015-2019.

PDRB Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Mandailing Natal sebesar 9.586,34 (rupiah) sedangkan pada tahun 2016 sebesar 10,660,04 (rupiah) dan nilai PDRB Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2019 yaitu sebesar 13.554,745 (rupiah). Kemudian sektor lapangan usaha yang paling banyak memberikan kontribusinya terhadap PDRB tersebut adalah Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan. Dengan memberikan kontribusi sebesar 4.271,58 (rupiah) pada tahun 2015 dan 5.819,71. (rupiah) pada tahun 2019.

Terkait dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya, kebijakan yang di dilakukan dapat memberikan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif , namun disisilain kewenangan pemerintah daerah harus memberikan konsekuensi kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan potensi sumber keuangan secara optimal.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandailing Natal 2016-2020

Kabupaten	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mandailing Natal	64,55	65,13	65,83	66,52	66,79

IPM di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 sebesar (64,55) di tahun 2017 menjadi sebesar (65,13) dan di tahun 2018 menjadi sebesar (65,83) peningkatan (0,63) ke tahun 2019 sehingga menjadi (66,52) dan mengalami peningkatan lagi (0,27) ke tahun 2020 sehingga IPM menjadi sebesar (66,79). Kesimpulan dari tabel IPM dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Disuatu daerah IPM mendekati 100 maka disuatu daerah dianggap kualitas manusia tersebut dikatakan bagus.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana deskriptif analisis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini akan dideskripsikan tentang perkembangan kondisi sosial dan ekonomi, dan perkembangan APBD di kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Metode dapat memberikan gambaran pada peneliti mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dan pemilihan metode yang tepat dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, (Mudrajad Kuncoro, edisi k.4) menyatakan

bahwa suatu penelitian bertujuan untuk mengembangkan, membuktikan, menemukan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah 3 bulan terhitung dari bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari pihak lain yang telah diproses dan dikumpulkan sebagai hasil atas penelitian yang dilaksanakan, sumber data tersebut antara lain: 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal. 2) Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lgger, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BPS, Bapenas, dinas pemerintahan dan literatur. Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal

1) Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ± 6.620,70 km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kab.Tapanuli Selatan;

Sebelah Selatan : Prov.Sumatera Barat;

Sebelah Barat : Samudera Indonesia;

Sebelah Timur : Prov.Sumatera Barat;

Iklim Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23 °C-32 °C dengan kelembaban antara 80-85 %. Sedangkan sumber mata air di kabupaten mandailing natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km, Parlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai- sungai itu membuktikan bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya.

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 % . Dan tingkat pertumbuhan 1,42% pertahun.

2) Kondisi Topografi Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan di beberapa kecamatan, juga daerah pesisir/daerah pantai di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Dataran rendah merupakan daerah pesisir, kemiringan 00 – 2 0 seluas 160.500 Ha (24,24%).

- b. Daerah/dataran landai, kemiringan 20 – 150 seluas 36.385 Ha (5,49%)
- c. Dataran Tinggi, kemiringan 150 – 400 . Dataran tinggi terdiri 2 jenis, yaitu 1. Daerah perbukitan, kemiringan 150 – 200 seluas 112.000 Ha (16,91%) 2. Daerah pegunungan, kemiringan 200 – 400 seluas 353.185 Ha (53,34%).

Perkembangan Indikator Sosial

1) Penduduk/ Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data yang dihasilkan dari Survei Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan pusat Statistik sebanyak 472.886 dimana angka tersebut bertambah 67.941 jiwa dibandingkan dengan hasil survey penduduk tahun 2010. 472.886 jiwa yang terdiri dari 235.487 jiwa penduduk laki-laki dan 237.408 penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada pada Penyabungan sebanyak 90,049 jiwa, Angka sex ratio penduduk Kabupaten Mandailing Natal adalah sebesar 99,2. Sex ratio adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang perempuan.

Dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, wilayah Kecamatan Penyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah 90049 jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44533 jiwa dan perempuan sebanyak 45516 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua yaitu Kecamatan Siabu dengan jumlah penduduk sebesar 53286 jiwa dengan rasio 95,6, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 26048 dan perempuan sebesar 27238. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu Kecamatan Ulu Pungkut dengan jumlah penduduk sebesar 4674 jiwa dengan rasio 100,1, jumlah yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 2338 jiwa dan yang berjenis perempuan yaitu sebesar 2336 jiwa. Sedangkan kecamatan kedua yang memiliki jumlah penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Naga Juang dengan jumlah penduduk sebesar 4845 Jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 2396 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 2449 jiwa.

Dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, wilayah Kecamatan Penyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai jumlah penduduk sebesar 90049 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk sebesar 347 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan kedua yang memiliki jumlah kepadatan penduduk adalah Kecamatan Siabu dengan jumlah penduduk 53286 jiwa sehingga kepadatannya adalah 154 jiwa/Km². Kecamatan Ulu Pungkut yang merupakan Kecamatan yang mempunyai penduduk terendah yaitu 4674 jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 16 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan kedua yang mempunyai kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Naga Juang dengan jumlah penduduk sebesar 4845 jiwa sehingga mempunyai kepadatan penduduk sebesar 83/Km². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal relatif belum merata.

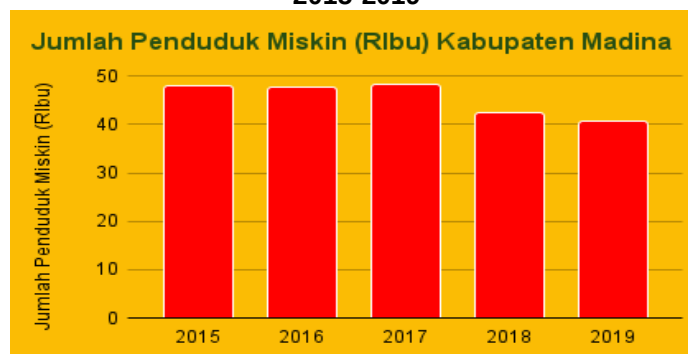
2) Tenaga Kerja

Pengangguran yang tinggi, penyediaan lapangan kerja baru dan produktivitas tenaga kerja yang rendah adalah permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat penanganan yang sangat serius dari pemerintah. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut jika tidak segera diatasi akan dapat menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa indikator mengenai ketenagakerjaan juga dapat dijadikan sebagai ukuran atau barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi maupun pembangunan di bidang

kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran. Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga kerja jauh lebih tinggi dibandingkan penyediaan lapangan kerja baru dan penggunaan teknologi yang relatif kurang padat karya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipacu oleh pertumbuhan konsumsi dan bukan karena penanaman modal baru (investasi) dan perluasan usaha. Pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi dengan peningkatan produktivitas. Tetapi hal itu juga kadang kala sulit tercapai karena pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan tenaga kerja tidak diikuti dengan peningkatan output per tenaga kerja yang memadai. Pemilihan teknologi yang padat karya harus lebih diutamakan untuk lebih dapat menyerap pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tinggi.

Permasalahan ketenagakerjaan harus mendapatkan perhatian lebih serius dikarenakan besarnya dampak yang timbul akibat kurangnya penyerapan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran (angkatan kerja yang tidak bekerja) yang tinggi akan berkaitan langsung terhadap meningkatnya permasalahan sosial yang lain, di antaranya masalah kriminalitas yang meningkat dan permasalahan kemiskinan yang akan cenderung meningkat pula. Salah satu cara dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan mengencangkan program-program pemerintah dalam penyediaan pendidikan, seperti mengadakan program-program pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan program kewirausahaan bagi para pencari kerja. Dalam hal ini, kewajiban pencari kerja untuk mendaftar di Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu persyaratan administrasi pada proses perekrutan pegawai di dunia usaha cukup memberikan ruang bagi pemerintah untuk memonitor kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal (Ribu) Tahun 2015-2019



Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal diatas dapat dilihat di tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 47,79 ribu, di tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak signifikan dengan jumlah 47,67 ribu, di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal menjadi 48,3 ribu sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah 42,39 ribu sedangkan di tahun 2019 terus mengalami penurunan sehingga menjadi 40,64 ribu penduduk miskin yang berada di Kabupaten Mandailing Natal.

3) Kesehatan

Program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup penduduk serta mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Penduduk yang sehat merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Hal ini berarti penduduk yang sehat memiliki potensi atau kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan nilai tambah ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tubuh yang sehat secara fisik memungkinkan seseorang untuk melakukan segala kegiatan sehingga mencapai hasil yang optimal dan mampu menjadi manusia berkualitas. Derajat atau tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu, keturunan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk juga sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang dikonsumsi penduduk. Dengan asupan makanan yang sehat bernutrisi maka tubuh akan menerima dampak positifnya. Tubuh harus menerima asupan makanan yang sesuai dengan takaran serta nilai-nilai kesehatan yang ada. Gizi yang cukup mampu mengatasi berbagai penyakit dan mencegah terjadinya masalah kesehatan. Tujuan utama pembangunan bidang kesehatan adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui pembangunan bidang kesehatan diharapkan dapat terwujud derajat kesehatan penduduk yang setinggi-tingginya sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan angka harapan hidup. Dalam mewujudkan derajat kesehatan penduduk setinggi-tingginya tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan misalnya melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan beserta tenaga medis berkualitas. Penyediaan prasarana kesehatan yang memadai sangatlah penting. Prasarana kesehatan yang memadai juga harus didukung dengan terpenuhinya gizi yang dikonsumsi penduduk sesuai dengan batas minimal kecukupan gizi. Tercukupinya gizi sejak usia dini dapat memperkecil peluang timbulnya stunting, sehingga harapannya lahirlah generasi sehat yang merupakan salah satu pendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesehatan.

Gambar 2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, 2014-2020



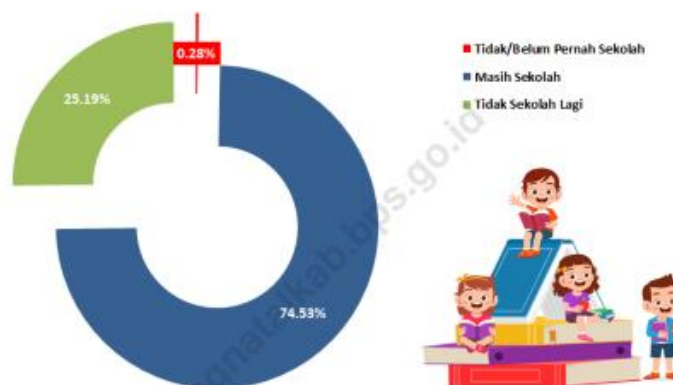
Berdasarkan dari gambar di atas dari tahun 2014 -2020 besaran persentase masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi di tahun 2014 dengan jumlah sebesar 24,22 persen, ditahun 2015 mulai mengalami penurunan sehingga menjadi 12,13persen. Besaran persentase ini terus mengalami penurunan dan kenaikan seiring dengan keadaan cuaca dan yang lainnya. Sehingga di ta-

hun 2020 sebanyak 13,48 persen masyarakat yang mengeluh dengan ada penyakit di diri mereka.

4) Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi produktif bagi suatu negara dan masyarakatnya. Dengan pendidikan yang cukup, masyarakat diharapkan akan mempunyai akses yang lebih besar pada informasi serta lebih mampu menerapkan dan memanfaatkan hasil kemajuan teknologi dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan standar hidup dan perekonomian masyarakat. Untuk menuju kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh pembangunan, pemerintah mencanangkan program wajib belajar serta menyediakan sarana sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Kesuksesan program wajib belajar baik di jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah tergantung dari ketersediaan fasilitas pendidikan dan kemudahan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Semakin lengkap fasilitas pendidikan yang dimiliki dan semakin mudah mengakses fasilitas pendidikan maka kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut akan lebih baik dan berkualitas. Faktor lainnya yang cukup penting bagi masalah pendidikan adalah tersedianya guru dengan rasio terhadap peserta didik yang ideal. Artinya guru tidak dibebani tanggung jawab mengajar dalam jumlah kelas maupun jumlah murid yang melebihi batas kemampuan idealnya. Dengan rasio antara jumlah guru terhadap jumlah murid yang ideal, proses belajar mengajar akan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Kepadatan murid dalam kelas yang ditunjukkan dari rasio murid terhadap kelas juga dapat mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Keberhasilan program wajib belajar dan kualitas pendidikan sumber daya manusia dapat diukur dari jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid, rasio murid terhadap guru, dan lainlain. Untuk memperluas kesempatan bersekolah bagi masyarakat, pemerintah senantiasa berusaha menambah daya tampung dari fasilitas belajar mengajar terutama sekolah-sekolah formal. Penambahan daya tampung sekolah dilakukan melalui penambahan sekolah, penambahan ruang belajar mengajar maupun juga pada Indikator Sosial Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Sekolah, Tidak Sekolah Lagi, dan Belum Sekolah 2020



Berdasarkan pada gambar diatas persentase penduduk usia 7-24 Tahun yang masih sekolah sebesar 74,53 persen dan yang belum sekolah 0,25 persen yang menjadi pusat perhatian adalah jumlah perentase penduduk usia 7-24 tahun yang tidak sekolah lagi sebesar 25,19 persen. Hal ini sangat didasari dari

tuntutan faktor ekonomi yang menghasruskan mereka putus sekolah dan mencari uang demi kelangsungan hidup selanjutnya.

5) Perkembangan IPM Kabupaten Mandailing Natal

Table 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandailing Natal 2016-2020
Perkembangan Indikator Ekonomi

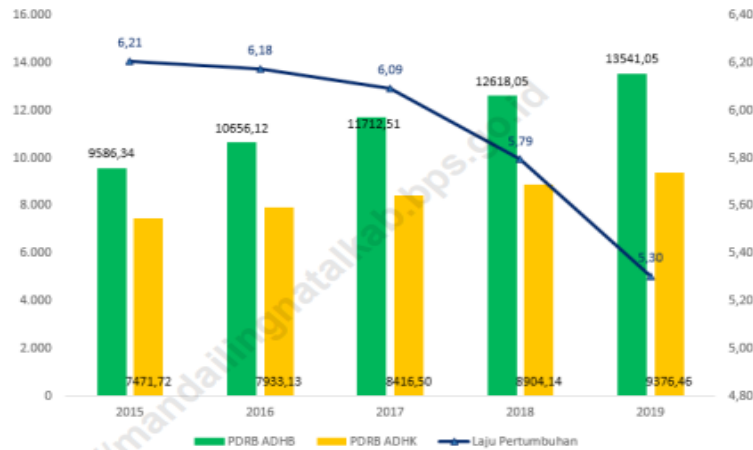
Kabupaten	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Mandailing Natal	64,55	65,13	65,83	66,52	66,79

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat data IPM di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 sebesar (64,55) di tahun 2017 menjadi sebesar (65,13) dan di tahun 2018 menjadi sebesar (65,83) peningkatan (0,63) ke tahun 2019 sehingga menjadi (66,52) dan mengalami peningkatan lagi (0,27) ke tahun 2020 sehingga IPM menjadi sebesar (66,79). Berdasarkan tabel IPM dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Disuatu daerah IPM mendekati 100 maka disuatu daerah dianggap kualitas manusia tersebut dikatakan bagus.

Perkembangan Indikator Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 2019 sebesar 12.541,05 miliar rupiah. Lapangan usaha yang menajadi penyumbang terbesar untuk PDRB setiap tahunnya itu sector pertanian dimana ditahun 2015 sebesar 4.271,58, di tahun 2016 sebesar 4.689,25, di tahun 2017 yaitu sebesar 5.158,32, sedangkan di tahun 2018 sebesar 5.497,99 dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5.819,71. Sedangkan untuk lapangan usaha yang paling sedikit berkontribus terhadap PDRB Kabupaten Mandailing Natal yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang dimana di tahun 2015 sebesar 2, 06, tahun 2016 sebesar 2,22, ditahun 2017 yaitu sebesar 2,43 sedangkan ditahun 2018 sebesar 2,85 dan ditahun 2019 yaitu sebesar 2,79. Lapangan usaha penyumbang terbesar terhadap kenaikan jumlah PDRB yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Di tahun 2015 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang terhadap PDRB sebesar 4.271,58 miliar rupiah, tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4.689,25 miliar rupiah, tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 5.158,32 miliar rupiah sedangkan ditahun 2018 terus mengalami kenaikan sehingga menjadi 5.497,99 miliar rupiah dan di tahun 2019 menajadi 5.819,71 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai matapencaharian sebagai petani dan nelayan di Kabupaten Mandailing Natal.

Gambar 4. PDRB Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015-2019



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 2019 sebesar 12.541,05 miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019, di tahun 2015 jumlah PDRB ADHK yaitu sebesar 7.473,72 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 7.933,13 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 8.416,50 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 8.904,14 miliar rupiah, dan di tahun 2019 9.376,46 miliar rupiah, dengan laju pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 6,21%, tahun 2016 sebesar 6,18%, di tahun 2017 sebesar 6,09% sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 5,79% dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5,30%.

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2019 (ribu rupiah)

Nomor	Tahun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1	2017	2.471.464.537,26
2	2018	2.695.512.046,84
3	2019	3.102.834.618,07

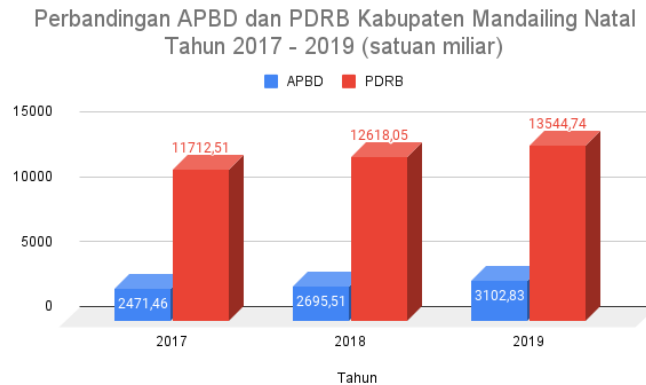
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan, di tahun 2017 jumlah APBD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 2.471.461.537,26 , di tahun 2018 Rp. 2.695.512.046,84 sedangkan di tahun 2019 jumlah APBD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 3.102.834.618,07.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mandailing Natal (Miliar) tahun 2017-2019

Nomor	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto
1	2017	11.712,51
2	2018	12.618,05
3	2019	13.544,74

Berdasarkan tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017-2019 dapat dilihat nilai PDRB terus mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2017 sebesar 11.712,51 sedangkan di tahun 2018 meningkat sebesar 905,54 sehingga menjadi 12.618,05 dan di tahun 2019 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 926,69 sehingga menjadi 13.544,74.

Gambar 5. Perbandingan APBD dan PDRB Kabupaten Mandailing Natal 2017-2019



Dari diagram perbandingan APBD dan PDRB kabupaten Mandailing Natal 2017 – 2019 menunjukkan tren peningkatan. Apabila kita lihat data di atas menunjukkan bahwa APBD Mandailing natal setiap tahun mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 APBD 2.471,46 miliar dan pada tahun 2018 2.695,51 miliar dan hingga pada tahun 2019 mencapai angka 3.102,83 miliar. Sedangkan pada PDRB juga mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar dan pada tahun 2018 naik menjadi 12.618,05 hingga pada tahun 2019 menjadi 13.544,74. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah APBD berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Purnama (2019) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan kondisi sosial seperti variabel kemiskinan, IPM dan pengangguran setiap tahunnya mengalami kenaikan, dari kondisi ekonomi seperti variabel PDB, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi infrastruktur juga mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Analisis Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi pasca kebijakan fiskal Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari analisis yang dilakukan Perkembangan indikator sosial di Kabupaten Mandailing Natal setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat dilihat dari kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia yang setiap tahunnya terus meningkat dan jumlah kemiskinan terus menurun indikator ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan

2. Dari analisis yang dilakukan terhadap perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Mandailing Natal di era kepemimpinan Dahlan-Sukhairi yaitu ditahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah APBD berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB.

REFERENSI

- Ardila, I., Febriaty, H., & Astuti, R. (2021, November). Factors that Influence the Financial Literacy on Micro Small and Medium Enterprise. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 144-149).
- Astuti, R., Akbar, L. Y., & Hasibuan, L. S. (2021, August). Pengaruh Motivasi dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan PT. Deltamas Surya Indah Mulia Medan. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 8-13).
- Azhar, M. E., Nurdin, D. U., & Siswadi, Y. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(1), 46-60.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). 2021
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka* .2020
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS), Tahun 2020
- Badan Pusat Statistik(BPS) *Kabupaten Mandailing Natal 2020*
- Bannock, Graham, R. E. Baxter dan Evan Davis. 2011. *A Dictionary of Economics*. Inggris: Penguin Books Ltd
- Dari, W., Hamdani, R., & Marpaung, A. P. (2021, July). FAKTOR KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN: SEBUAH STUDI KASUS. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 1, No. 1, pp. 289-294).
- Daulay, R., Hafni, R., & Nasution, S. M. A. (2022, March). The Determinant Model of Passenger Satisfaction with Low-Cost Carrier Airlines in Indonesia During the Covid-19 Pandemic. In *7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021)* (pp. 198-204). Atlantis Press.
- Deddy T. Tikson. 2005. *Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi*.
- Effendi, I., & RS, P. H. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Bank Syariah. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(2), 221-230.
- Hafni, R., Sinulingga, N. S., & Hasibuan, L. S. (2021, November). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (studi kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Hariani, P. (2011). Analisis Penyerapan Tamatan Perguruan Tinggi Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU*, 11(2).
- Hasibuan, L. S., Hariani, P., & Pratiwi, A. S. (2021). Poverty Development Post Fiscal Decentralization Policy In Otsus Fund Receiving Province In Indonesia (Case Study: Province Of Papua, West Papua, And Aceh). *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 2(2), 562-574.
- Januri, F. S., & Sari, E. N. (2015). Factors Affecting Good university governance: The Concept of Theoretical. *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*. Index Copernicus Value, 62.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Press
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi keempat. Erlangga. Jakarta.
- Lexy. J. Moelong, (2000) *Metodologi penelitian Kuantitatif*, Bandung PT Remaja Rosdakarya.

- Lubis, H. Z., Eriska, P., Bismala, L., Arifin, M., Hidayat, F. P., IKom, M., ... & Lesmana, G. (2021). *Inovasi Pembelajaran di Masa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (New Normal); Antara Peluang dan Tantangan* (Vol. 1). umsu press.
- Manurung, Mandala. 2008. *Teori ekonomi makro*. Edisi keempat: lembaga penerbit FE UI.
- Marpaung, A. P., Harjito, D. A., Hamdani, R., & Ghazali, A. W. (2022). Boards of directors' feminism, audit committee, and corporate social responsibility. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(1), 16-30.
- Muis, M. R., Gultom, D. K., Jufrizen, J., & Azhar, M. E. (2020). Model Elektronik Word of Mouth: Citra Destinasi, Kepuasan dan Loyalitas Wisatawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 21(1), 1-19.
- Mukmin, M., Gunawan, A., Arif, M., & Jufrizen, J. (2021). Pengujian Konstruk Literasi Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 291-303.
- Nasution, E. Y., & Febriaty, H. (2022, March). Market Digitalization Impact of Income SMEs during Pandemic. In *7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021)* (pp. 175-178). Atlantis Press.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Pohan, M., Jufrizen, J., & Annisa, A. (2021, November). Pengaruh Konsep Diri, Kelompok Teman Sebaya, Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Dimoderasi Literasi Keuangan. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Pratikno, Riyono, *Komunikasi dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1999
- Rahayu, S. E. (2021, November). Analysis of Indonesian Non-Oil and Gas Export Development by Manufacturing Sector 2016-2020 Period. In *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* (Vol. 4, No. 2, pp. 576-583).
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021, November). Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Sabrina, R. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia: Unggul, Kreatif, dan Inovatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 216-222.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 12. Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, D. A., & Januri, J. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Non Debt Tax Shield Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 45-50.